

**USAHA-USAHA CAMAT DALAM RANGKA PEMBINAAN
MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

A Y U B

NPM : 05 850 0059

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : USAHA-USAHA CAMAT DALAM RANGKA
PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI
SERDANG

Nama Mahasiswa : A Y U B

NPM : 05 850 0059

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Menyetujui

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

DRS. H.M. YUSUF HARAHAP

PEMBIMBING II

TAUFIK SIREGAR, SH., M.HUM.

DEKAN

DRS. H.M. Husni Thamrin Nst, MSi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23



KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “USAHA-USAHA CAMAT DALAM RANGKA PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG”.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs. H.M. Husni Thamrin Nst, MSi, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area,

- Bapak Drs. H.M. Yusuf Harahap, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Camat Kecamatan Kotarih Kabupaten Deli Serdang beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, bagi keduanya bakti dan doa penulis. semoga kebersamaan yang kita jalani selama ini tetap menyertai kita, semoga Tuhan melindungi dan meridhoi rumah tangga kita.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2009

Penulis

A Y U B

NPM : 05 850 0059

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	5
F. Hipotesis	8
BAB II. URAIAN TEORITIS	9
A. Pengertian Masyarakat	9
B. Organisasi Ekonomi Masyarakat	10
C. Peranan Organisasi / Lembaga Ekonomi	12
D. Pengertian Pembangunan	15
E. Pengertian Pemerintah Kecamatan	18
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Populasi dan Sampel	21
B. Metode Pengumpulan Data	22
C. Variabel Penelitian	22
D. Teknik Analisis Data	24

BAB IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
	A. Keadaan Umum	25
	B. Keadaan Khusus	31
	C. Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang	33
BAB V.	ANALISIS DATA	40
	A. Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembangunan	40
	B. Kedudukan dan Wewenang Camat Selaku Kepala Wilayahnya	46
	C. Analisa Terhadap Penyelenggaraan Koordinasi di Wilayah Kecamatan	49
	D. Analisis Struktur Organisasi Wilayah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan	51
	E. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	53
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini dalam struktur tata negara Republik Indonesia Pemerintahan kecamatan masih tetap ditempatkan sebagai unit pemerintahan terendah. Dalam pada itu juga menjadi kenyataan bahwa pemerintah kelurahan sebagai alat pemerintah yang ada dan langsung di bawah kecamatan merupakan tempat tumpuan segala urusan dari segenap unsur pemerintah yang langsung berada di atasnya.

Dalam rangka usaha pelaksanaan pembangunan dewasa ini pemerintahan kecamatan memegang peranan yang sangat menentukan karena bagian terbesar dari potensi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini terdapat di tingkat kelurahan.

Menurut Wismar Purba, Pembangunan kecamatan dapat didefinisikan sebagai :

Keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di kecamatan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik, material maupun mental spritual dalam suatu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh, terpadu, bertahap, terkordinasi dinamis dan berkelanjutan serta tetap dalam batas-batas kepribadian nasional dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat.”¹

¹ Wismar Purba, *Sustryawan TNI, Kepdes /Lurah*, MP, 324, Kodam I Bukit Barisan, 1997, hal. 74.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan diwujudkan dalam bentuk prasarana dan swadaya gotong royong. Untuk mewadahi partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan tersebut.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat diberbagai bidang, merupakan usaha untuk dapat memperkecil/meniadakan keterbelakangan dan kemiskinan yang masih dirasakan sebagian rakyat Indonesia terutama masyarakat yang berdomisili di pedesaan/kelurahan.

Pada dasarnya Pembangunan Nasional bertujuan : Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang : ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, dimana pelaksanaannya tetap didasarkan atas azas pemerataan di seluruh pelosok tanah air, sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara, bahwa :

Pembangunan masyarakat perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Dengan demikian masyarakat makin mampu mengerahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya.²

Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembangunan kecamatan dilaksanakan melalui prakarsa dan pembangunan kecamatan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dan prakarsa serta swadaya masyarakat itu sendiri. Di samping itu dijelaskan pula bahwa pembangunan merupakan prioritas utama untuk dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, terutama bagi anggota masyarakat yang pendapatannya relatif rendah, yakni : buruh tani, petani penggarap, nelayan, pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat, berarti kesejahteraan masyarakat semakin meningkat pula, sehingga dapat menimbulkan dampak positif, seperti meningkatnya tingkat pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Dengan demikian pembangunan perekonomian masyarakat kecamatan hanya akan terwujud jika pelaksanaannya mencerminkan keterpaduan antar unsur pemerintah sebagai pembina dan pembimbing, sedang unsur masyarakat sumber daya, prakarsa, swadaya dan partisipasi. Bertitik tolak dari keseluruhan uraian di atas maka penulis memilih judul untuk skripsi ini, yakni : “ **Usaha-Usaha Camat Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang** “.

² Departemen Penerangan RI, *Tap. MPR No. II Tahun 1993*, hal. 19.

B. Perumusan Masalah

Setiap kejadian yang timbul pada diri manusia maka akan mengakibatkan timbulnya permasalahan, dan biasanya dengan kemampuannya dia akan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut secara rasional dan objektif.

Winarno Surachmad mengatakan :

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilakukan (dengan jalan mengatasinya) apabila kita ingin berjalan terus.

Selanjutnya setiap permasalahan yang ada agar tidak mengambang dan membingungkan maka dibuatlah suatu perumusan masalah, yang bertujuan agar masalah tersebut jelas batasannya, kedudukannya dan sekaligus mencari alternatif pemecahannya.

Berdasarkan pemikiran di atas dirumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana peranan dan usaha-usaha camat dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang”.

C. Pembatasan Masalah

Ditinjau dari judul yang penulis sajikan dapat diambil suatu pembatasan masalah yaitu :

1. Sejauh manakah usaha-usaha camat dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

2. Penelitian dilakukan pada tahun 2007 – 2008.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh data dan informasi sekaligus membuktikan tentang usaha-usaha camat dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang .
2. Untuk memperoleh kepastian dan kebenaran masalah dan sekaligus mencari pemecahannya,
3. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akademi dalam rangka memperoleh gelar S1 Kesarjanaan Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang,
2. Penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang untuk dipakai dalam merumuskan kebijaksanaan dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Sebelum melangkah lebih lanjut, seorang peneliti harus terlebih dahulu

menentukan kerangka pemikiran sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan

penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto :

Kerangka pemikiran adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas yang nantinya berguna untuk memperkuat permasalahan dan membantu peneliti dalam memperjelas menetapkan objek penelitian, instrumen, pengumpulan data serta wilayah pengambilan data.³

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional terdapat dalam Undang-undang Dasar alinea ke-IV yaitu :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan abadi dan keadilan sosial.⁴

Tujuan Nasional di atas sangat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap tingkatan, dari tingkatan pusat sampai ketingkat yang terendah yaitu desa atau kelurahan.

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan, salah satu kunci keberhasilan dari setiap usaha pembangunan.

Menurut Winardi keikutsertaan atau partisipasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

Partisipasi secara formal dapat didefinisikan sebagai turut sertanya seorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih pada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi yang bersangkutan terdapat dan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.⁵

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 65.

⁴ *Undang-Undang Dasar 1945*, Pembukaan.

⁵ Winardi, *Azas-Azas Manajemen*, Alumni Bandung, 1999, hal. 54.

Begitupun berhasilnya kegiatan yang dilakukan lebih banyak ditentukan oleh faktor orang-orang yang menjadi aparat pemerintahan desa. Kemampuan manajerial dari aparat pemerintahan desa dalam merangkul dan memberdayakan lembaga ataupun kelompok masyarakat sangatlah dibutuhkan, karena bagaimanapun partisipasi yang dibangun tidak akan dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya keterbukaan kemampuan dan kegigihan dari aparat pemerintah desa sendiri.

Karena itu untuk menjelaskan hal-hal di atas, maka peranan komunikasi antara pemeritahan dan masyarakat haruslah terbangun dengan baik.

T. Hani Handoko mengatakan bahwa : “ Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain “. ⁶

Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik vokal dan sebagainya dan pemindahan yang efektif memerlukan tidak hanya transformasi data, tetapi sangat tergantung pada ketrampilan-ketrampilan tertentu (membaca, mendengar, berbicara, melihat dan lain-lain), untuk membuat suksesnya pertukaran informasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembangunan nasional bertujuan untuk mecapai tujuan nasional.
2. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.
3. Kemampuan manejerial aparatatur pemerintah kecamatan dalam rangka dan memberdayakan lembaga dan kelompok masyarakat akan menentukan partisipasi masyarakat.

⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1991, hal. 272.

F. Hipotesis

Setelah peneliti mengadakan pendataan untuk menentukan kerangka dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya di dalam penelitian.

Kartini Kartono mengatakan bahwa :

“ Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenrannya dengan jalan research. Oleh karena itu hipotesa adalah dugaan yang mungkin banar atau munkgin juga salah “.⁷

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

“Semakin baik kemitraan antara camat dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta dengan aparat pemerintahan kelurahan, maka semakin baik pembangunan daerah tersebut “.

⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1996. hal. 70.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Perekonomian Masyarakat

Sebelum menjelaskan pengertian tentang perekonomian masyarakat, penulis akan mengemukakan pengertian tentang perekonomian.

Perekonomian berasal dari kata dasar ekonomi yang menurut Sadono Sukirno mengandung arti ouiku yang berarti aturan-aturan dan norma yang berarti rumah tangga, sehingga ekonomi mengandung arti aturan-aturan rumah tangga.

Sedangkan ekonomi sebagai ilmu, menurut Prof, PA, Samuelson, yang dikutip oleh Sadono Sukirno, bahwa :

Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber-sumber daya.⁸

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa ekonomi adalah cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan sumber daya alam yang ada, yakni berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan pengertian masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian di atas adalah

⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Bima Grafika, Jakarta, 1992, hal. 3.

sekelompok manusia yang saling bekerjasama dan mengorganisir dirinya sebagai suatu kesatuan sosial.

Dari uraian-uraian di atas dan dengan membandingkan pengertian ekonomi negara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian masyarakat adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan sektor rumah tangga masyarakat, sektor perusahaan dan sektor pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

B. Organisasi Ekonomi Masyarakat

Pada uraian di atas telah dikemukakan bahwa masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat pedesaan/kelurahan kompleks namun secara lambat laun pasti masalah tersebut akan dapat diatasi dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang.

Upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat adalah dengan mengorganisir mereka kedalam suatu wadah yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi.

Salah satu bentuk organisasi ekonomi masyarakat adalah “ arisan/jula-jula, yakni perkumpulan/gerakan gotong royong menabung uang untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan undian bagi mereka yang menarik arisan. “⁹

⁹ Sumber Saparin, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 147.

Di samping itu ada juga organisasi yang secara eksplisit merupakan organisasi ekonomi rakyat, yakni koperasi, seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 yang menjelaskan :

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan “. ¹⁰

Organisasi ekonomi rakyat di Kelurahan berkembang menjadi Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD) seperti yang dikemukakan dalam Lampiran Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 1984, yang menjelaskan :

1. Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk oleh desa dari satu desa, atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang dapat merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat terkecil.
2. Pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. ¹¹

Sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi, seperti yang disebutkan di atas, maka KUD memiliki fungsi-fungsi yaitu :

1. Perkreditan
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya.
3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi
4. Kegiatan perekonomian lainnya. ¹²

¹⁰ G. kartasapoetra, Cs, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Bina Aksara, Jakarta, 1994, hal. 3.

¹¹ Sekretariat Menko Ekuin dan Wasbang, *Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD*, Jakarta, 1994, hal. 5.

¹² Ibid, hal. 278.

Dari pengertian di atas bahwa KUD adalah merupakan suatu badan usaha/organisasi ekonomi yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Adapun kedudukan pemerintah dalam KUD, adalah sebagai pembina dan pembimbing agar KUD benar - benar dapat tumbuh dan berkembang dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini juga dapat merangsang masyarakat untuk berpartisipasi nyata dalam pembangunan atas dasar swadaya gotong royong serta dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan guna meningkatkan taraf hidup.

Dengan demikian KUD merupakan salah satu bentuk swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perekonomian, sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat desa/kelurahan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian desa/kelurahan tersebut. Dengan meningkatnya perekonomian desa/kelurahan akan memperlancar segala kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal ini dimungkinkan apabila adanya peran aktif masyarakat dalam bentuk swadaya gotong royong. Dengan demikian kegiatan swadaya masyarakat akan meningkatkan perekonomian desa/kelurahan yang sekaligus akan memberikan umpan balik pada peningkatan swadaya masyarakat itu sendiri.

C. Peranan Organisasi/Lembaga Ekonomi

Pelaksanaan pembangunan kelurahan memerlukan dana, daya pikir dari berbagai pihak seperti dikemukakan oleh Drs. Bayu Suryaningrat mengklasifikasikan sumber biaya bagi pembangunan kelurahan yaitu :

1. Melalui inpres

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

2. Tidak melalui inpres
3. Swadaya masyarakat kelurahan
4. Swadaya masyarakat sendiri ¹³

1. Melalui Inpres

Yang termasuk dalam pembangunan melalui dana inpres adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian pembangunan jalan, jembatan, prasarana pasar dan lain-lain yang tidak mungkin dibiayai oleh pemerintah kelurahan atau pemerintah desa.

2. Tidak melalui Inpres

Pembiayaan pembangunan yang tidak melalui inpres adalah pembangunan yang dibiayai pemerintah daerah, meskipun perencananya dilakukan oleh Pemerintah kelurahan.

3. Swadaya masyarakat kelurahan.

Pembiayaan melalui swadaya masyarakat kelurahan adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah kelurahan yang sumber dananya adalah seluruh warga masyarakat kelurahan yang bersangkutan.

4. Swadaya masyarakat sendiri

Pembiayaan dari swadaya masyarakat itu sendiri ialah pembangunan yang berlangsung dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat kelurahan itu sendiri.

¹³ Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta, 1995, hal. 146.

Dari keempat sumber dana tersebut, maka yang sangat diharapkan peranannya adalah sumber dana yang berasal dari swadaya masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa untuk memenuhi dan merealisasikan segala kebutuhan masyarakat, bukan hanya tanggung-jawab pemerintah melainkan tanggung-jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat harus dapat diciptakan, sehingga dapat menanggulangi masalah-masalah, salah satu tugas pokok pemerintah yakni memberikan bimbingan dan penyuluhan di samping memberikan dana bantuan sebagai perangsang sehingga masyarakat berperan melalui partisipasi yakni dalam hal pikiran, inisiatif dan bantuan modal dalam usaha meningkatkan kegiatan yang dikelola oleh lembaga-lembaga ekonomi.

Organisasi/lembaga ekonomi dikaitkan sebagai sumber pendukung swadaya masyarakat dalam pembangunan, oleh karena organisasi/lembaga ekonomi melalui sistem yang diterapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang secara tidak langsung membantu penyelenggaraan pembangunan kelurahan.

Melalui organisasi ekonomi, maka diharapkan adanya kemudahan dan keuntungan yang diperoleh, antara lain :

1. Organisasi/lembaga ekonomi dapat memberikan fasilitas pemasaran, sehingga masyarakat dapat menjual hasil produksinya dan membeli/mendapatkan sarana produksi dari lembaga tersebut. Dipihak lain bahwa harga hasil produksi dapat stabil serta sarana produksi harganya dapat ditekan.

2. Organisasi/lembaga ekonomi dapat menyediakan pinjaman kepada masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dengan bunga yang layak.

3. Organisasi/lembaga ekonomi dapat bertindak sebagai bapak angkat dari produksi kerajinan atau industri rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam pemasaran.
4. Dengan tersedianya pasar, kredit dan penampungan hasil produksi, maka kegairahan bekerja dan produktivitas semakin meningkat.
5. Dengan meningkatnya produktivitas kerja, maka akhirnya tingkat pendapatanpun akan naik pula.
6. Organisasi/lembaga ekonomi dapat menyediakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

D. Pengertian Pembangunan

Menurut Talizuddin Ndrata pembangunan dapat diartikan sebagai “ usaha yang diselenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan di segala bidang dalam rangka mencapai tujuan negara dan bangsa “¹⁴

Sedangkan Sondang P. Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai “ suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa “. ¹⁵

¹⁴ Talizuddin Ndrata , *Pengertian Desa dan Pembangunan Desa*, Yayasan Karya Darma II, Jakarta, 1997, hal 35.

¹⁵ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal. 2.

Berbicara mengenai pembangunan maka kita harus mengerti apa arti pembangunan. Pembangunan adalah perubahan keadaan yang lebih baik dilaksanakan secara sadar dan terus menerus.

Seperti tercantum dalam Tap/MPR/No. II/1989 bahwa hakekat daripada pembangunan itu sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Disini jelas terlihat bahwa pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dalam ikatan bangsa Indonesia yang mencerminkan situasi tersebut.

Dilihat dari uraian di atas dapatlah digambarkan betapa luasnya bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dan memerlukan partisipasi dari sebanyak mungkin seluruh penduduk Indonesia.

Tetapi kadang kala perubahan tidak dilihat dari segi aspek lingkungan masyarakat tersebut, misalnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sehingga Pembangunan yang ditetapkan itu hanya berlaku di dalam konsep, dan segala yang dicita-citakan itu hampa adanya.

Oleh sebab itu berhasilnya Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara.

Dapat diterangkan lebih lanjut bahwa proses ini bukan merupakan proses yang mudah dan tidak tanpa gejolak maupun perasaan yang sering emosional, mengingat

bahwa titik tolak Pembangunan bangsa ialah suatu bentuk Bhinneka, dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/9/23

perbedaan dalam kebiasaan maupun tata nilai kelompok masyarakat. Adapun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bukanlah suatu kegiatan yang asal jadi ataupun meniru dan mengikuti mode pembangunan yang dilaksanakan di negara lain melainkan sungguh-sungguh didorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dan martabat masyarakat Indonesia.

Hal inilah yang merupakan cita-cita dari mendirikan Negara Kesatuan RI dalam Tahun 1945. Karena itu pula kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan bagian integral dari perjuangan bangsa Indonesia.

Keinginan untuk merdeka sangat erat hubungannya akan adanya suatu citra tentang masa depan, suatu citra diri bangsa Indonesia, yang ditentukan oleh pengalaman masa lampau.. Sejak semula para ahli menyadari bahwa manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, dan sehubungan dengan itu terbentuklah suatu citra tentang masa depan yang menjadi pendorong bagi kegiatan manusia selanjutnya.

Kita juga mengetahui bahwa pembangunan mempunyai tujuan yaitu terdiri dari jangka panjang, jangka menengah , jangka pendek. Dan untuk melaksanakan pembangunan itu diperlukan adanya kemampuan untuk melaksanakannya.

Adapun kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, yang terdiri dari beberapa variabel yaitu :

1. Kepemimpinan
2. Struktur organisasi
3. Sarana dan fasilitas yang terbagi atas :

- a. Sarana fisik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23



- b. Biaya
 - c. Skill
 - d. Peraturan-peraturan dan perundangan yang melandasi tata kerja kegiatan organisasi.
4. Teknologi yaitu cara yang digunakan oleh organisasi yang bersangkutan di dalam proses pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan bukan saja sebagai perubahan tetapi juga sebagai :

1. Sebagai suatu proses evolusi.
2. Mencakup bidang materi dan non materi yang dihubungkan dengan kemajuan teknologi.
3. Pemikiran tentang pembangunan sebagai suatu arah gerak yang penting dalam kemajuan pembangunan secara bertahap.
4. Adanya keterbatasan dalam pembangunan di sektor ekonomi disebabkan keterbatasan daya tampung lahan ekonominya.

E. Pengertian Pemerintahan Kecamatan

Untuk memberikan batasan tentang pemerintahan kecamatan dalam pembahasan ini akan dikemukakan menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi batasan, bahwa : “Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan Daerah

Kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan “. Selanjutnya dalam Pasal 66

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota..

Sedangkan dalam pasal 66 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa Kepala kecamatan disebut Camat. Selanjutnya dari ayat (3) Pasal di atas dikatakan bahwa Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu rumusan bahwa unsur-unsur terbentuknya pemerintahan kecamatan adalah :

1. Adanya suatu wilayah
2. Adanya sejumlah penduduk
3. Adanya pemerintahan.

Dari hal tersebut di atas penulis dapat menggambarkan bahwa Camat adalah aparat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan kecamatan yang memiliki jenjang pertanggung jawaban kepada Bupati/Walikota, yang mempunyai tanggung-jawab di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pemerintahan umum dan juga bertanggung-jawab terhadap pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta menyelenggarakan koordinasi fungsional di kecamatan.

Dari keadaan tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa perangkat kecamatan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diberhentikan oleh Kepala Daerah atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi apabila seorang perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugasnya haruslah memperhatikan tentang ketentuan peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, dan apabila ada penyelewengan yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya, maka perangkat kecamatan tersebut dapat diberhentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

BH. Ericson dalam bukunya “memahami data statistik untuk ilmu sosial” mengatakan : “ Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian, pada dasarnya populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui “. ¹⁶

Sedangkan sample berarti contoh, yaitu sebagian dari hal yang menjadi objek penelitian. Menurut Sapari Iman Asyari, yang dimaksud dengan sample adalah : “contoh yang dapat mewakili populasi atau cermin dari keseluruhan objek yang diteliti “. ¹⁷

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya prosedur penelitian : “Apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih “.

¹⁶ BH. Ericson dan T. Nomsamchue, *Memahami Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta 1998, hal 156.

¹⁷ Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosiologi*, Usaha Nasional, Surabaya 1993, hal. 70

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi populasi sekaligus sample yang penulis ambil adalah semua personil kepegawaian yang terdapat di Kantor Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.



B. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan, dalam penulisan ini penulis menggunakan :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dan diperoleh dari buku-buku, artikel, mas media, dan lain sebagainya.

2. Penelitian Lapangan.

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun kelapangan untuk mengadakan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini melalui :

- Interview/wawancara dengan sumber-sumber yang dirasakan penulis dapat memberikan masukan.
- Pengamatan/observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati keadaan di lapangan secara langsung.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan salah satu unsur dari suatu penilaian. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang saling berpengaruh.

1. Variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah : “sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi munculnya gejala atau faktor atau unsur yang lain, yang pada gilirannya gejala atau unsur yang kedua disebut variabel terikat.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Fungsi Camat Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat, dengan indikatornya yaitu :

- Mengadakan kegiatan musyawarah desa.
- Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan gotong royong.
- Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang ketahanan masyarakat desa.

2. Variabel terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah : “ Sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang ada atau muncul yang dipengaruhi atau ditentukan dengan adanya variabel bebas.”

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah : “Peningkatan Pembangunan kelurahan,” dengan indikatornya yaitu :

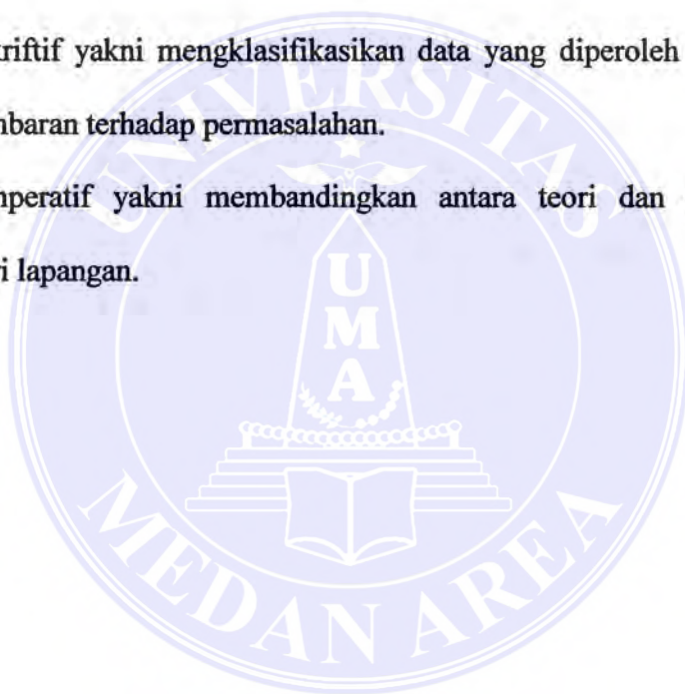
- Terjadinya interaksi yang baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan aparat pemerintah.
- Peningkatan pembangunan.
- Pemerataan pembangunan baik fisik material maupun mental spritual yang berkesejahteraan.

D. Metode Analisis Data

Penganalisaan data yang diperoleh melalui penelitian harus dilaksanakan hipotesis atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga dapat dengan jelas kita simpulkan apakah hipotesis diterima atau tidak.

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka dipergunakan metode analisa sebagai berikut :

1. Analisa deskriptif yakni mengklasifikasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberi gambaran terhadap permasalahan.
2. Analisa komperatif yakni membandingkan antara teori dan data-data yang diperoleh dari lapangan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum

1. Letak Geografis

Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Sebagai salah satu wilayah kelurahan di wilayah Hukum Kabupaten Deli Serdang maka keberadaan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sangatlah mendukung kebijaksanaan-kebijaksanaan daerah. Adapun jarak Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Ibukota Kecamatan sekitar 1 km, sedangkan jarak ke ibukota Lubuk Pakam sekitar 5 km, dan jarak keibukota propinsi sekitar 23 km.

Luas wilayah Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah 1169 Ha, yang terdiri dari tanah dataran. Untuk lebih jelasnya perihal penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

**Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah
Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009**

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Wilayah (ha)
1.	Pemukiman	1152
2.	Bangunan (fasilitas umum)	5
3.	Pertanian (basah dan kering)	-
4.	Perikanan	-
5.	Tegalan	-
6.	Lain-lain (jalan – lapangan)	12
Jumlah		1169

Sumber : Kantor Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang terbagi atas 11 desa, dan berada di atas permukaan laut setinggi 3m.

2. Keadaan Penduduk

Masalah kependudukan adalah faktor yang perlu diperhitungkan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang hingga akhir Januari 2001 berpenduduk 9747 jiwa dengan 1971 KK. Jumlah penduduk laki-laki 4826 Jiwa dan penduduk wanita sebanyak 4921 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk
Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009

No.	Jenis Kelamin	Jumlah/jiwa
1.	Laki-laki	4826
2.	Wanita	4921
	Jumlah	9747

Sumber : Kantor Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang berjenis kelamin wanita lebih banyak dibandingkan pria. Sedangkan kategori umur penduduk belum didapatkan oleh peneliti, termasuk halnya pasangan usia subur. Tetapi data tentang penduduk usia kerja sebanyak 6970 jiwa, penduduk usia kerja yang bekerja sebanyak 4632 dan penduduk usia kerja yang belum bekerja sebanyak 2338.

3. Keadaan Sosial

Sebagian besar penduduk Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang bekerja di sektor swasta baik itu bekerja di sektor swasta maupun juga bekerja secara sendiri-sendiri.

Untuk melihat pengelompokkan penduduk menurut mata pencahariannya maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3

**Pengelompokan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah/Jiwa
1.	Pegawai kelurahan	4
2.	Guru	20
3.	Pegawai Negeri Sipil/TNI-Polisi	55
4.	Mantri Kesehatan/perawat	12
5.	Bidan	5
6.	Dokter	1
7.	PNS Lainnya	22
8.	Pensiunan TNI-Polisi/Sipil	15
9.	Pegawai Swasta	175
10.	Pegawai BUMN/BUMD	10
11.	Pegadaian	10
12.	Warung	40
13.	Kios	10
14.	Toko	2
15.	Hotel	1
16.	Konsultan	1
17.	Tukang Kayu	15
18.	Tukang Batu	4
19.	Penjahit	5
20.	Tukang cukur	2
	Jumlah	382

Sumber : Kantor Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

4. Keadaan Sosial Budaya

a. Adat Istiadat

Kehidupan masyarakat Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah kategori masyarakat modern karena hidup di dekat Ibu Kota Propinsi yang merupakan sumber masuknya kebudayaan luar. Tetapi meskipun demikian konsep gotong royong masih tertanam pada masyarakat Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Hal

ini dapat terlihat dari kerjasama dalam hal pelaksanaan pembangunan sarana-sarana

umum, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya yang membutuhkan kerjasama.

Adat istiadat yang berlaku dan kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di tengah masyarakat masih tetap dipegang teguh seperti upacara pernikahan, upacara khitanan dan upacara adat istiadat lainnya. Akan tetapi melihat golongan muda sudah begitu tidak tertarik terhadap adat istiadat tersebut di atas. Hal ini terjadi karena golongan muda tersebut ingin lepas dari lingkungan tradisi dan ingin membentuk serta mewujudkan identitas diri mereka sesuai dengan kehendak pribadinya. Selanjutnya golongan muda ini sudah dipengaruhi oleh budaya dan pola hidup masyarakat kota, karena letak wilayah Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yang disebutkan sebelumnya.

Untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dan menghimpun para pemuda agar dapat menyalurkan aspirasinya serta keterampilannya, maka pemerintah Kelurahan melakukan upaya pembinaan melalui pendidikan karang taruna.

b. Agama

Mengenai kehidupan keagamaan secara keseluruhan penduduk Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tidak terdapat datanya pada kelurahan yang dijadikan daerah penelitian. Meskipun demikian dapat dipahami suatu kenyataan bahwa pemeluk agama yang terbesar pada kelurahan ini adalah agama Islam, hal ini dibuktikan dengan sarana ibadah yang terdapat di Kecamatan Beringin Kabupaten

Deli Serdang yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

Tabel 4

**Jumlah Prasarana Keagamaan
Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009**

No.	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Langgar	6
3.	Gereja Kristen	6
4.	Gereja Katholik	1
5.	Kapel Khatolik	-
6.	Vihara	1
7.	Pura	-

Sumber : Kantor Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

c. Pendidikan

Dari segi pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dinilai masih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5

**Penduduk Dirinci Berdasarkan pPendidikan
Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah /jiwa
1.	Buta Aksara dan Angka	10
2.	Tidak tamat SD	1629
3.	Tamat SD	2142
4.	Tamat SLTP	1836
5.	Tamat SLTA	1042
6.	Tamat Akademi	256
7.	Sarjana	52

Sumber : Kantor Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebagian besar sudah merasakan pendidikan tetapi terbatas pada sekolah dasar dan sebagian kecil yang melanjutkan ke atas.

Keadaan di atas tidak terlepas dari sarana pendidikan yang dimiliki oleh Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yaitu :

Tabel 6

**Jumlah Prasarana Pendidikan
Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009**

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD	1
3.	SLTP	1
4.	SLTA	-
5.	Universitas	-

Sumber : Kantor Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Rendahnya tingkat pendidikan juga disebabkan karena budaya pergaulan antara anak-anak remaja dimana pada usia sekolah SLTP dan SLTA mereka malah tidak melanjutkan pendidikannya, mereka cenderung sekedar berkumpul yang tidak ada gunanya bagi mereka aatupun mencari pekerjaan.

Selain karena sarana tersebut di atas, di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ini belum ada sarana yang lain misalnya tempat-tempat kursus, keterampilan yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mereka.

B. Keadaan Khusus

Keadaan kesehatan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang masih perlu ditingkatkan dan juga menyediakan prasarana kesehatan yang masih minim.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7

**Jumlah Prasarana Kesehatan
Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007**

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Apotek	-
2.	Rumah Sakit umum	-
3.	Rumah Sakit Bersalin	2
4.	Poliklinik	-
5.	Posyandu	1
6.	Rumah sakit khusus	-
7.	Puskesmas	1
8.	Puskemas Pembantu	1
9.	Dokter praktek	-

Sumber : Kantor Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Tenaga medis dan paramedis sangat diperlukan dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Tenaga medis di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sangat minim bila ditinjau dari perkembangan masyarakat dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Ini sangat mempengaruhi pelaksanaan gerakan keluarga berencana.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8

**Jumlah Tenaga Medis
Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007**

No.	Jenis Tenaga Medis	Jumlah
1.	Dokter umum	1
2.	Bidan	3
3.	Mantri kesehatan	1
4.	Perawat	2
5.	Dukun Bayi terlatih	7

Sumber : Kantor Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Bila dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga paramedis lebih banyak merupakan dukun bayi terlatih sedangkan tenaga medis lainnya tidak banyak. Melihat kondisi ini maka kesehatan kurang terpelihara di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Oleh karenanya Camat sebagai penguasa tunggal di bidang Pemerintahan dan sekaligus sebagai pejabat tertinggi di wilayah Kecamatan yang lepas dari persoalan pangkat, yang bertanggung-jawab dan berkewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

Adapun pola pembagian tugas di Kantor Camat adalah sebagai berikut :

1. Camat adalah sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, dan kemasyarakatan yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lokal

Kecamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan ketentuan yang diberikan oleh Bupati Deli Serdang.

- c. Memegang kebijaksanaan politik dalam rangka usaha memelihara keamanan, ketertiban, di wilayahnya.
 - d. Mengadakan kerjasama dengan unsur TNI/Polri yang bertugas di wilayah Kecamatan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan.
 - e. Melaksanakan tugas dibidang sipil lainnya di wilayah Kecamatan.
 - f. Melaksanakan tugas sebagai prajaksa.
 - g. Memberikan saran-saran, pertimbangan kepada Bupati Deli Serdang tentang langkah-langkah yang akan ditempuh.
2. Sekretriati Wilayah Kecamatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Camat dalam bidang tugasnya.
 - b. Memimpin dan menyelenggarakan administrasi kantor Camat,
 - c. Memepersiapkan segala sesuatu tugas Camat,
 - d. Membuat laporan keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan sesuai dengan petunjuk Camat.
3. Satuan Polisi pamong praja Kecamatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas-tugas dibidang ke-prajaksanaan sesuai dengan petunjuk Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atau usaha-usaha kegiatan untuk mengamankan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya sesuai dengan petunjuk Camat.

c. Mengumpulkan dan menyusun data-data dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatannya.

4. Urusan pembangunan yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut :

a. Membantu sekretaris Wilayah Kecamatan dalam bidang tugasnya.

b. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data pembangunan desa/kelurahan dan pembangunan pada umumnya.

c. Melaksanakan diklat bagi masyarakat serta melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kependudukan.

d. Menyusun dan memberikan petunjuk penyusunan program dalam rangka koordinasi perencanaan program pembangunan sistem unit daerah kerja pembangunan di Wilayah Kecamatan.

e. Melakukan pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan menyelenggarakan lomba desa.

f. Melakukan pembinaan pembangunan prasarana desa dan penegmbangan perekonomian desa.

g. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemukiman kembali, pemugaran lingkungan di wilayah Kecamatan.

h. Melakukan membina administrasi pelaksanaan bantuan pembangunan pemerintah pusat kepada Kepala Kelurahan dan bantuan pembangunan yang berasal dari Tingkat I dan II.

i. Melakukan pembangunan koordinasi dalam rangka mensukseskan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/9/23

program Bimas, Insus, Penghijauan dan sebagainya.

5. Urusan Kemasyarakatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu sekretaris wilayah Kecamatan dalam bidang tugasnya.
 - b. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data untuk pembinaan kesejahteraan rakyat.
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacad, tuna karya, panti asuhan dan lain-lain.
 - d. Mempersiapkan penyusunan program pembinaan kesejahteraan rakyat.
 - e. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan, generasi muda, kebersihan, keluarga berencana, peningkatan mutu gizi, pemberantasan penyakit menular, kepramukaan dan lain-lain.
 - f. Memeberikan petunjuk-petunjuk untuk meningkatkan usaha-usaha sosial kemasyarakatan.
 - g. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat maupun Sekretaris Wilayah Kecamatan.

6. Urusan Administrsi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Sekretaris Wilayah Kecamatan dalam bidang tugasnya
 - b. Melakukan urusan surat menyurat
 - c. Menyimpan dan memelihara arsip-arsip surat
 - d. Melakukan pengetikan, penggandaan surat-surat dan naskah dinas lainnya yang diperlukan .

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/9/23

- e. Mengurus Pembukuan Keuangan.
- f. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka mutasi pegawai (pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan lain-lain).
- g. Mengurus pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan yang telah digunakan/dikeluarkan.
- h. Mengurus dan membayar gaji pegawai.
- i. Merencanakan, mengadakan, memelihara alat-alat perlengkapan kantor.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat maupun Sekretaris Wilayah Kecamatan.

Melihat dari struktur organisasi atau pola pembagian tugas/kerja Pemerintah Wilayah Kecamatan ada dua (2) jabatan yang langsung bertanggung jawab kepada Camat yaitu Sekretaris Wilayah Kecamatan dan satuan Polisi Pamong Praja, di samping Jabatan Kepala Desa/Kelurahan yaitu Pemerintah yang berjenjang vertikal/hirarkhis dari bawah ke atas.

Di bawah Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai atau staf Pamong praja, sedangkan dibawah Sekretaris wilayah Kecamatan ada empat (4) Kepala Urusan yaitu :

1. Kepala Urusan Pemerintahan
2. Administrasi
3. Kemasyarakatan
4. Pembangunan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

Yang selanjutnya di bawah Kepala Urusan adalah para Pegawai/staf Urusan yang bersangkutan. Selain dua (2) jabatan yang berada dibawah camat tersebut ada lagi jabatan yang disebut Unsur Aparat Departemen dalam Negeri yaitu Ka. Wamil hansip ini adalah bersifat komando artinya Camat dapat membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Camat selaku Kepala Wilayah.

Di samping itu masih ada lagi jabatan instansi otonom yang ada di Kecamatan seperti :

- a. Unit pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Pendapatan (UPTDDP).
- b. Seksi Dinas P dan K Kecamatan
- c. Urusan Seksi Kebersihan kecamatan
- d. Polisi Kehutanan
- e. Menteri Perkebunan

Sedangkan instansi-instansi vertikal di Kecamatan adalah :

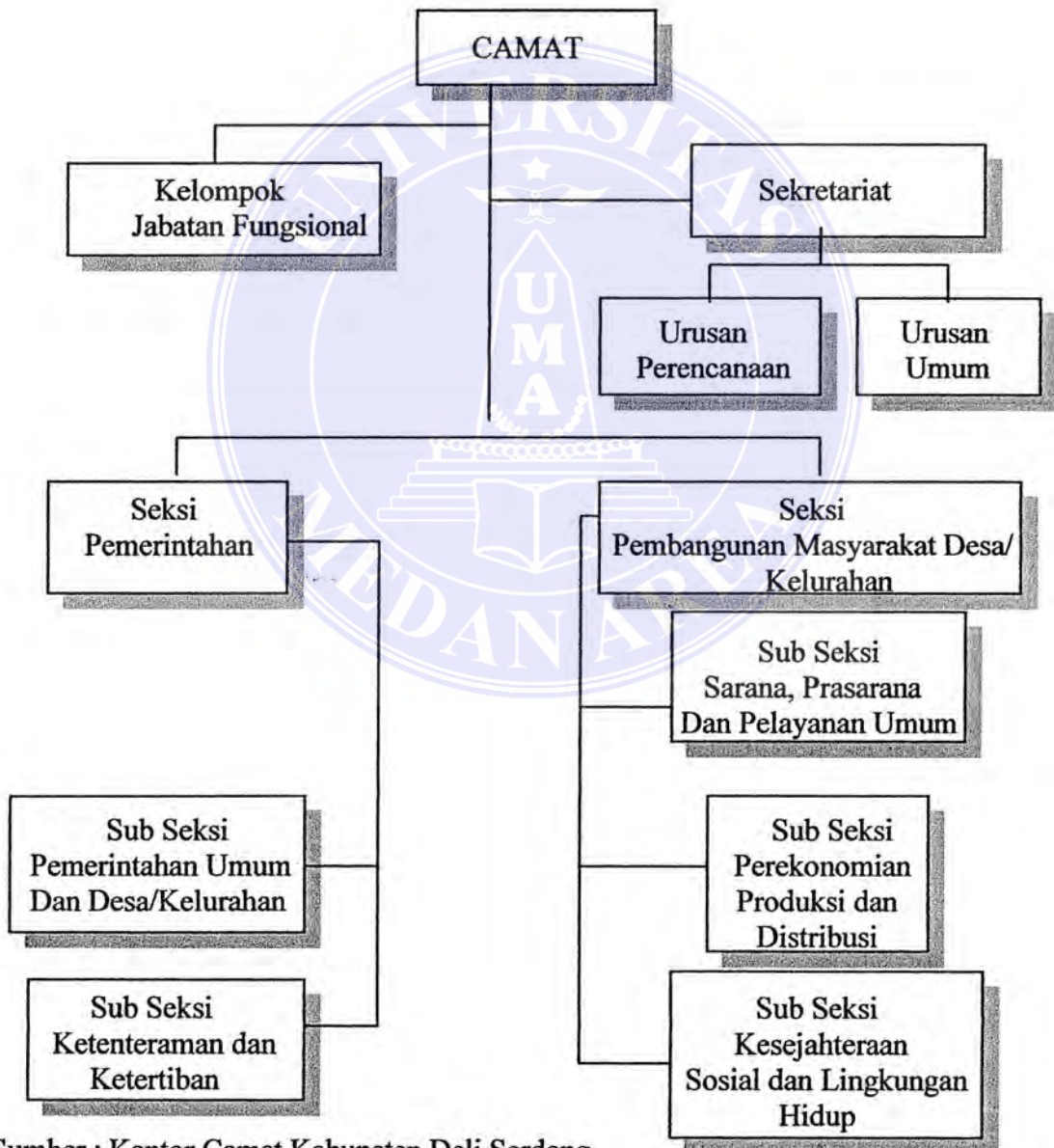
- a. Koramil.
- b. Polsekta
- c. Ka. PPLKB Kecamatan
- d. Juru Penerangan (JUPEN)
- e. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
- f. Kantor Pos dan Giro Kecamatan
- g. Dan lain-lain.

Demikianlah Struktur/susunan organisasi pola pembagian tugas/kerja pada Kantor Camat yang secara terperinci dan telah nyata adanya pembagian

tugas yang jelas diantara terikat serta saling mendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Gambar 1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan
Kabupaten Deli Serdang



Sumber : Kantor Camat Kabupaten Deli Serdang
UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa fungsi dan peranan Camat sebagai kepala Wilayah dimaksudkan sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan telah dilaksanakan. Hal ini terlihat dari susunan organisasi pola pembagian tugas atau kerja yang ada pada kantor Camat Beringin Kabupaten Deli Serdang yang secara terperinci dan telah nyata adanya pembagian tugas yang jelas antara seluruh aparat-aparat pemerintahan yang ada telah terkait serta saling dukung mendukung untuk mewujudkan akan tujuan-tujuan pembangunan.
2. Camat dalam menjalankan fungsi koordinasinya terhadap semua pelaksanaan pembangunan di wilayahnya terutama di tingkat kelurahan, selalu mengadakan kunjungan, tatap muka dengan pemuka masyarakat di samping juga mengadakan pertemuan-pertemuannya dengan Lurah yang ada di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.
3. Bertitik tolak pada hipotesis di atas yaitu jika Camat dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di Kecamatannya dengan baik maka fungsi dan perannya selaku Kepala Wilayah dapat tercapai dengan baik, karena di dalam, melaksanakan tugasnya Camat harus bekerjasama dengan instansi

diterima.

B. Saran

1. Camat sebagai kepala wilayah dapat berfungsi secara efektif dan efisien jika hambatan-hambatan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, untuk itu sudah saatnya pemerintahan pusat mempertegas kembali tentang sejauh mana sebenarnya Camat sebagai administrator pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas-tugas Camat khususnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat hendaknya Camat sebagai kepala wilayah lebih meningkatkan koordinasi lagi dengan instansi vertikal yang ada di Kecamatannya sehingga dengan demikian setiap masalah yang penanganannya berkaitan dengan unit organisasi lain dapat diselesaikan secara integral.
3. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan maka camat perlu memperhatikan struktur sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta, 1995.
- BH. Ericson dan T. Nomsamchue, *Memahami Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta 1998.
- Departemen Penerangan RI, *Tap. MPR No. II Tahun 1993*.
- G. kartasapoetra, Cs, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Bina Aksara, Jakarta, 1994.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1996.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Bima Grafika, Jakarta, 1992.
- Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosiologi*, Usaha Nasional, Surabaya 1993.
- Sekretariat Menko Ekuin dan Wasbang, *Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD*, Jakarta, 1994.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1997.
- Suharsimi Arikunto, *Proseddur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Sumber Saparin, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Alumni, Bandung, 1999.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1991.
- Talizuddin Ndraba, *Pengertian Desa dan Pembangunan Desa*, Yayasan Karya Darma II, Jakarta, 1997.
- Undang-Undang Dasar 1945*, Pembukaan.
- Winardi, *Azas-Azas Manajemen*, Alumni Bandung, 1999.
- Wismar Purba, *Sustriyawan TNI, Kepdes /Lurah*, MP, 324, Kodam I Bukit Brisian, 1997.